



RENCANA KERJA 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat 2015 ini.

Renja – SKPD (Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini disusun sebagai gambaran awal rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 1 (satu) tahun kedepan, dengan memberikan skala prioritas pada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah dalam pembangunan, sehingga rencana kerja SKPD ini, dapat selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada di lapangan.

Dengan berpedoman pada rencana strategis Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, usulan program dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil usulan dari tingkat kecamatan dan desa dan hasil telaahan serta identifikasi kebutuhan masyarakat oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat setelah melalui beberapa tahap pengusulan, sebagaimana prosedur yang telah biasa dilaksanakan.

Semoga, apa yang menjadi Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ini, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Juli 2014
**KEPALA BPMD
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

Dra. AIDA LAILAWATI
NIP 19680303 198911 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD.....	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan & Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	33
3.3. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi BPMD Kab. Ktw, Barat	

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RPJM yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yaitu : ***"Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kotawaringin Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan
- 2) Mengembangkan Usaha Ekonomi dan Masyarakat Desa / Kelurahan.
- 3) Meningkatkan Peranan Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana Kerja (Renja) BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah.
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 12 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
- 14 Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa
- 16 Permendari Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- 17 Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

- 18 Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- 19 Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
- 20 Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- 21 Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 24 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 tahun 2009 tentang tugas Pokok dan Fungsi Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 adalah:

1. Sebagai acuan BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

.BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada

SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPMD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2013

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 2.800.109.000,- dengan 11 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.439.927.501,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 88,16 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,13 %.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Capaian	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Masyarakat Desa				
I	Program Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	100.000	9,09
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya air, listrik & telepon	34.948.478	59,50
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya servis kendaraan dan pajak STNK	747.700	53,40
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi	46.090.000	88,66
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih	17.688.500	94,71
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12.600.000	94,14
	7. Penyediaan Jasa ATK	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor	15.250.900	98,73
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya spanduk, fotocopy dan penjilidan	14.800.000	98,66
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Terjaminnya penerangan kantor	1.200.000	100
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	102.650.000	97,61
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia Makanan dan Minuman Pegawai	5.380.000	78,19
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keterpaduan Kebijakan Program antara Pemerintah Pusat, Propinsi	124.073.886	95,48

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

		dan Kabupaten		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif	39.743.000	99,35
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1.875.000	100
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	39.650.000	99,84
	4. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas / Operasional	47.300.000	73,14
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.700.000	54,83
III	Peningkatan Disiplin Aparatur			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai BPMD Kab. Ktw. Barat	18.426.000	99,60
IV	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Pelatihan Bintel dan Kursus Ketrampilan Pengembangan Potensi Pegawai	18.944.600	60,14
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	989.000	99,53
	2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	362.200	98,53
	3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun	2.155.600	99,72
VI	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			
	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa / Kelurahan dalam Pembangunan	107.697.270	89,72
	2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Menambah pengetahuan Masyarakat dan Peduli Lingkungan	23.842.300	97,35
	3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Pengetahuan dan Pengenalan Masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna	65.178.100	56,01

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

VII	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
	1. Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pedesaan	35.155.300	34,52
	2. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedesaan	Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pedesaan	284.912.990	96,58
VIII	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			
	1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa	Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Gerakan Pembangunan Partisipatif oleh Masyarakat Desa dan Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa	154.484.300	98,30
	2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	49.045.200	97,30
	3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Meningkatkan Kemandirian dan Keswadayaan Masyarakat Dalam Membangun dan Mengembangkan Desa / Kelurahan	303.899.618	88,00
	4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	135.090.700	91,62
IX				
X	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			
	1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Terlatihnya Perempuan di Pedesaan	61.373.350	90,26
XI	Program Penyusunan & Pendaaygunaan Profil Desa & Kelurahan			
	1. Penyusunan Pendataan Profil Desa & Kelurahan	Tersedianya data Profil Desa/Kelurahan sebagai data awal perencanaan pembangunan	190.723.000	72,87
XII	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan			
	1. Pembinaan Organisasi Perempuan	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	479.850.509	98,53
TOTAL			2.439.927.501	87,13

Penjelasan Capaian Realisasi TA 2013

Secara umum capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2013 sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik dan berkontribusi besar terhadap capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2013, antara lain;

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp. 58.730.000,- yang dianggarkan hanya terealisasi 59,50% atau Rp. 34.948.478, hal ini disebabkan pada saat penganggaran Tahun Anggaran 2013 diperkirakan akan ada penambahan biaya listrik akibat penambahan AC, namun ternyata pemasangan instalasi AC baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2013.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa dari Rp. 116.350.000,- hanya terealisasi 56,01 % atau Rp. 65.178.100,- dikarenakan ada satu sub kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu survey pembangkit listrik tenaga air yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-, namun dalam perjalanan tahun berjalan, ternyata ada kenaikan biaya dari pihak ketiga sehingga menjadi Rp. 75.000.000,-. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014.
3. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa dari Rp. 101.816.300,- yang dianggarkan hanya terealisasi 34,52% atau Rp. 35.155.300,- dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, antara lain ; sub kegiatan Lomba Pasar Desa, dikarenakan tidak ada petunjuk teknis dari Provinsi maupun pusat ; Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi ; Pelatihan Tata Kelola BUMDes, dikarenakan masih belum adanya data Desa yang mempunyai BUMDes atau embrio BUMDes.
4. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dari Rp. 345.320.362,- yang dianggarkan hanya terealisasi 88,00 % atau Rp. 303.899.618,- dikarenakan adanya pengurangan jumlah murid yang mendapatkan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Hal ini terjadi akibat adanya siswa yang Lulus, Pindah, Mutasi ke luar daerah.

5. Kegiatan Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan dari Rp. 261.715.900,- yang dianggarkan hanya terealisasi 72,87 % atau Rp. 190.723.000,- dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain ; Belanja Upah Kerja, hal ini disebabkan tidak sesuainya data jumlah penduduk pada saat perencanaan dengan yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan ; biaya perjalanan dinas yang dipergunakan sesuai kebutuhan.

Sedangkan Capaian RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2012	2013			SKPD	Keterangan
			Target	Realisasi	%		
1	Jumlah desa yang diperbahurui Profil Desa nya	0	94	28	29,79	BPMD	Keterbatasan Anggaran TA 2013 menyebabkan baru bisa di mengakomodir untuk melakukan Perbaharuan Profil Desa pada 28 Desa
2	Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	94	94	94	100%	BPMD	
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1	100%	BPMD	
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang Terlatih	0	0	-	0	BPMD	Kegiatan baru bisa dibiayai pada tahun 2014
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	100%	BPMD	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena ada perubahan pagu anggaran dari pihak ketiga pada saat Tahun Berjalan (2013) dan tidak sempat dianggarkan kembali pada Anggaran Perubahan TA 2013

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2014
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.**

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2014		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 0 6 0 0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 418.897.165	Rp. 375.529.464	89,64	Rp 522.515.763	Rp 522.515.763	100	

**Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015**

1	0	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim.	100%	100%	Rp 1.100.000	Rp 100.000	9,09	Rp 13.285.000	Rp 13.285.000	100
1	0	0	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Sumber Daya Air Selama 12 Bulan.	100%	100%	Rp 58.730.000	Rp 34.948.478	59,50	Rp 110.040.000	Rp 110.040.000	100
1	0	0	0	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhnya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor.	100%	100%	Rp -	Rp -		Rp 19.800.000	Rp 19.800.000	100
1	0	0	0	0	4	Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		-	-				-	-	
1	0	0	0	0	5	Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah		-	-				-	-	
1	0	0	0	0	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional.	100%	100%	Rp 1.400.000	Rp 747.700	53,40	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	100
1	0	0	0	0	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa/ Honor Vakasi pengelola keuangan, pembantu bendahara, pengurus dan pemegang barang.	100%	100%	Rp 51.980.000	Rp 46.090.000	88,66	Rp 57.732.500	Rp 57.732.500	100
1	0	0	0	0	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhnya jasa Petugas jaga Malam dan petugas kebersihan kantor.	100%	100%	Rp 18.676.200	Rp 17.688.500	94,71	Rp 27.769.200	Rp 27.769.200	100

**Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015**

1	0	0	0	0	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor.	100%	100%	Rp 13.384.000	Rp 12.600.000	94,14	Rp 20.940.000	Rp 20.940.000	100
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	100%	Rp 15.446.200	Rp 15.250.900	98,73	Rp 57.852.600	Rp 57.852.600	100
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak maupun Penggandaan Kantor.	100%	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.800.000	98,66	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor Selama 12 Bulan.	100%	100%	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	100	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	100
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk menunjang tugas- tugas kantor.		100%	Rp 105.158.150	Rp 102.650.000	97,61	Rp 10.393.300	Rp 10.393.300	100
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kepentingan tugas- tugas kantor.	-	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	-
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundangan- undangan.	-	-	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	-
1	0	0	0	1	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-		Rp -	Rp -		-	-	

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	0	0	0	1	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpeenuhinya Makanan dan Minuman kantor.	100%	100%	Rp 6.880.000	Rp 5.380.000	78,19	Rp 6.032.000	Rp 6.032.000	100
1	0	0	0	1	1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi untuk memadukan Kebijakan Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.	100%	100%	Rp 129.942.615	Rp 124.073.886	95,48	Rp 176.071.163	Rp 176.071.163	100
1	0	0	0			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp 153.001.375	Rp 132.268.000	86,44	Rp 547.890.775	Rp 547.890.775	100
1	0	0	0	0	1	Pembangunan rumah jabatan		-		Rp -	Rp -		-	-	
1	0	0	0	0	2	Pembangunan rumah dinas		-		Rp -	Rp -		-	-	
1	0	0	0	0	3	Pembangunan gedung kantor	Terpeenuhinya Pembangunan Gedung kantor yang representatif	-		Rp 40.000.000	Rp 39.743.000	99,35	Rp 226.500.000	Rp 226.500.000	100
1	0	0	0	0	4	Pengadaan mobil jabatan		-		Rp -	Rp -		-	-	
1	0	0	0	0	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang Representatif.	100%		-	-	-	Rp 105.000.000	Rp 105.000.000	100
1	0	0	0	0	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		-		Rp -	Rp -		-	-	

**Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015**

1	0	0	0	0	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhiya Perengkapan Gedung Kantor guna menunjang aktifitas kantor.	100%	100%	Rp 1.875.000	Rp 1.875.000	100	Rp 53.000.000	Rp 53.000.000	100		
1	0	0	0	0	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
1	0	0	0	0	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhiya Peralatan Gedung Kantor.	100%	100%	-	-	-	Rp -	Rp -	-		
1	0	0	0	1	1	Pengadaan mebeleur		100%	100%	-	-	-	Rp -	Rp -	-		
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor.	100%	100%	Rp 39.710.375	Rp 39.650.000	99,84	Rp 35.251.775	Rp 35.251.775	100		
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		-	-	Rp -	Rp -						
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Service Kendaraan Dinas/ Operasional.	100%	100%	Rp 64.668.000	Rp 47.300.000	73,14	Rp 147.189.000	Rp 147.189.000	100		
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah		-	-	Rp -	Rp -		-	-			

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	0	0	0	2	1	jabatan/dinas											
	6	1	2	6	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Jabatan/Dinas		-	-	Rp -	Rp -						
	6	1	2	7	8												
1	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor.	100%	100%	Rp 6.748.000	Rp 3.700.000	54,83	Rp 7.950.000	Rp 7.950.000	100		
	6	1	2	8	9												
1	0	0	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
	6	1	2	9	0												
1	0	0	0	4	2	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
	6	1	2	0	1												
1	0	0	0	4	2	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
	6	1	2	1	2												
1	0	0	0	4	2	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
	6	1	2	2	3												
1	0	0	0	4	2	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan		-	-	Rp -	Rp -		-	-			
	6	1	2	3	4												
1	0	0	0	4	2	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan		-	-	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -			
	6	1	2	4	5												

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	0	0	0	0	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran		-	Rp	Rp		-	-				
1	6	1	6	4	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertib Administrasi dalam Penyusunan Laporan.	5 Buku	5 Buku	Rp 2.161.600	Rp 2.155.600	99,72	Rp 1.023.000	Rp 1.023.000	100		
1	2	0	1			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				Rp 260.876.250	Rp 196.717.670	75,40	Rp 545.115.400	Rp 545.115.400	100		
1	2	0	1	0	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/ Kelurahan.	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	Rp 120.035.950	Rp 107.697.270	89,72	Rp 307.497.000	Rp 307.497.000	100		
1	2	0	1	0	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.	400 Orang	400 Orang	Rp 24.490.300	Rp 23.842.300	97,35	Rp 30.795.000	Rp 30.795.000	100		
1	2	0	1	0	3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terciptanya Peran Aktif Masyarakat dalam bidang Teknologi Tepat Guna.	100%	100%	Rp 116.350.000	Rp 65.178.100	56,01	Rp 206.823.400	Rp 206.823.400	100		

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	2	0	1			Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				Rp 396.816.300	Rp 320.068.290	80,65	Rp 391.579.100	Rp 391.579.100	100
1	2	0	1	0	1	Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman		-	-	Rp -	Rp -		-	-	
1	2	0	1	0	2	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa.	250 Orang		Rp 101.816.300	Rp 35.155.300	34,52	Rp 121.579.100	Rp 121.579.100	100
1	2	0	1	0	3	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan		-	-	Rp -	Rp -		-	-	
1	2	0	1	0	4	Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan		-	-	Rp -	Rp -		-	-	
1	2	0	1	0	5	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi PNPd- MPd.	100%	100%	Rp 295.000.000	Rp 284.912.990	96,58	Rp 270.000.000	Rp 270.000.000	100
1	2	0	1	0	6	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan		-	-	Rp -	Rp -		-	-	
1	2	0	1	0	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		-	-	Rp -	Rp -		-	-	

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	2 2	0 1	1 7			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				Rp 700.296.860	Rp 642.519.818	91,74	Rp 601.945.422	Rp 601.945.422	100
1	2 2	0 1	1 7	0 1	1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa	Terbinanya Peningkatan Pembekalan Bagi Aparatur Desa.	450 Orang	6 Desa PM2L, 3 SM2L	Rp 157.140.800	Rp 154.484.300	98,30	Rp 168.006.000	Rp 168.006.000	100
1	2 2	0 1	1 7	0 2	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa.	405 Desa		Rp 50.402.400	Rp 49.045.200	97,30	Rp. 45.043.960	Rp. 45.043.960	100
1	2 2	0 1	1 7	0 3	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyaluran dana PMT-AS, Lomba Desa dalam meningkatkan ketahanan Fisik/ tubuh anak sekolah.	6545 Orang	1.104 Orang/Siswa	Rp 345.320.362	Rp 303.899.618	88,00	Rp 231.895.462	Rp 231.895.462	100
1	2 2	0 1	1 7	0 4	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.	6 Kec	6 Kec	Rp 147.433.298	Rp 135.090.700	91,62	Rp 157.000.000	Rp 157.000.000	100
1	2 2	0 1	1 9			Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				Rp 67.993.350	Rp 61.373.350	90,26	Rp 75.109.220	Rp 75.109.220	100

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	2	0	1	0	1	Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Terlaksananya pelatihan Peran Perempuan Di perdesaan.	210 Orang	30 Orang	Rp 67.993.350	Rp 61.373.350	90,26	Rp 75.109.220	Rp 75.109.220	100
1	2	0	2			Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan				Rp 261.715.900	Rp 190.723.000	72,87	Rp 289.871.122	Rp 289.871.122	100
1	2	0	2	0	1	Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan	Profil Desa dan Kelurahan di 2 Kecamatan sasaran	2 Kec.	6 Kec.	Rp 261.715.900	Rp 190.723.000	72,87	Rp 289.871.122	Rp 289.871.122	100

Selain Program dan Kegiatan diatas, pada Tahun Anggaran 2013 juga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/1298/V/DPKD/2012 Perihal Pengalihan Kegiatan Peranan Wanita (PKK) Tanggal 3 Desember 2012 juga menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan dan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan matrik sebagai berikut:

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2014		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22	01	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan				Rp 486.989.000	Rp 479.850.509	98,53	Rp 413.700.500	Rp 413.700.500	100	
1	22	01	18	01 1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Meningkatnya SDM anggota organisasi wanita	100%	100%	Rp 486.989.000	Rp 479.850.509	98,53	Rp 413.700.500	Rp 413.700.500	100	

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 5.005.664.,- terurai dalam 12 program dan 36 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat, pada dasarnya kegiatan BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pemberdayaan dalam rangka pemberantasan kemiskinan. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa / kelurahan;
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan Profil Desa sebagai data awal perencanaan pembangunan desa
- d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ikut berperan serta dalam membangun desa/kelurahan;
- e. Minimnya pengetahuan dan akses masyarakat desa terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna
- f. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan dan pelestarian sumber daya alam desa/kelurahannya;
- g. Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan khususnya dalam ikut meningkatkan pendapatan keluarga;
- i. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sebagai bahan pembangunan daerah;
- j. Belum meratanya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan asupan gizi yang seimbang sebagai penunjang usaha mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang;
- k. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas aparatur pemberdayaan masyarakat;

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPMD dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur desa, anggota BPD, kelembagaan desa dan SM2L tentang pembangunan partisipatif melalui pelatihan dan sosialisasi intensif dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Melaksanakan Fasilitasi dan pelatihan bagi Aparatur Desa dalam rangka pemahaman yang lebih komperhensif tentang pembangunan partisipatif
2. Strategi Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui pemberian asupan gizi yang seimbang dengan penyaluran Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk anak sekolah di desa tertinggal dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Menyalurkan bantuan tambahan makanan sebagai penambah gizi bagi anak sekolah sebagai stimulan bagi pembangunan jangka panjang.
3. Strategi Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Pembangunan Desa yang partisipatif (melibatkan semua *stakeholder*) dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa sebagai dasar pembangunan daerah secara keseluruhan
 - Memfasilitasi terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dari tingkat yang paling rendah yaitu musyawarah pembangunan desa.
 - Memfasilitasi diperbaharunya Profil Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Strategi Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat dan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan melalui nilai-nilai positif masyarakat seperti gotong royong dan kompetisi pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan partisipatif
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Lomba Desa
5. Strategi Peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna melalui pelatihan, monitoring dan penyediaan akses ke teknologi tepat guna dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan teknologi tepat guna penunjang pembangunan desa/kelurahan
 6. Strategi Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan sumber daya alam desa/kelurahannya melalui pelatihan dan sosialisasi sumber daya air bersih dan lingkungan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang sumber daya alam desa/kelurahannya
 7. Strategi Memperkuat kelembagaan usaha mikro kecil di perdesaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Melaksanakan fasilitasi dan pelatihan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah
 - Mengarahkan dan membina lembaga usaha mikro kecil dan menengah sehingga bisa mandiri
 - Melaksanakan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka pemahaman lebih komperhensif tentang pengelolaan keuangan desa.
 8. Strategi Meningkatkan peranan perempuan dalam usaha ikut menunjang pendapatan keluarga melalui pelatihan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan pengetahuan dan kapasitas kaum perempuan di perdesaan untuk ikut menunjang peningkatan pendapatan keluarga.
 9. Strategi Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dengan program PNPM-Integrasi melalui monitoring dan evaluasi yang intensif dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif dan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan Dana Desa

10. Strategi Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemberdayaan desa melalui bimbingan teknis dan penyediaan sarana prasarana penunjang yang memadai dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan Kapasitas, kualitas, sarana dan prasarana aparatur pemberdayaan desa
 - Melaksanakan Pelatihan bagi Aparatur Desa dalam rangka pemahaman lebih komperhensif tentang perencanaan pembangunan desa.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan program – program Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Dasar PERDA No. 27 Tahun 2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan PMD.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan.
 - Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
5. Bidang pemanfaatan Sumber Daya Desa/ Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - Sub Bidang Rehabilitasi, Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa dan Kelurahan.

- Sub Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan TTG.
- 6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro.
 - Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok:

- a. Pembangunan Desa dan Kelurahan;
- b. Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa dan Kelurahan;
- d. Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipilah dalam kelompok:
 - 1) Pembangunan Desa dan Kelurahan
 - 2) Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 3) Pemanfaatan Sumber Daya Desa / Kelurahan dan TTG.
 - 4) Usaha Ekonomi Masyarakat.
- b. Pengelolaan tugas umum ketatausahaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pengelolaan program pembantuan dan program provinsi.

Struktur Organisasi (terlampir)

Permasalahan

Kemiskinan masih merupakan salah satu permasalahan yang akan terus mengiringi langkah pembangunan suatu daerah. Bahkan, isu kemiskinan akan selalu menjadi hal utama dilaksanakannya pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Walaupun pembangunan di berbagai bidang sudah dilaksanakan, namun berdasarkan data BPS 2010, masih ada 6,27 % masyarakat miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, atau \pm 15.134 jiwa. Dan ini masih jauh diatas target penurunan kemiskinan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 berdasarkan MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu 3,62 %. Diperlukan usaha yang lebih untuk mencapai target penurunan kemiskinan tersebut. Salah satu upaya yang populer dalam penanggulangan kemiskinan dewasa ini adalah melalui pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan adalah *Bottom-Up* yang berlawanan dengan pendekatan konvensional yang *Top-Down*. Dalam artian, ada upaya untuk memberikan wewenang dan kekuasaan lebih kepada masyarakat untuk menentukan sendiri arah pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkannya.

Isu-isu dan permasalahan pemberdayaan masyarakat yang akan dihadapi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012-2016 tidak terlepas dari permasalahan tersebut diatas, yaitu pemecahan masalah kemiskinan secara komperhensif. Dalam konteks pemberdayaan, maka pemecahan masalah kemiskinan diatas adalah dalam hal memfasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
3. Banyaknya kebijakan daerah yang pro program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.
4. Kemauan dan keinginan yang tinggi dari segenap stakeholder dan masyarakat pada umumnya untuk membangun desa/kelurahannya.
5. Berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu daerah penghasil CPO dari kelapa sawit yang membuka banyak lapangan kerja.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tersebut belum diikuti oleh peningkatan dirasakan dan dinilai belum terlalu signifikan. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pemberdayaan khususnya yang berhubungan dengan bantuan sosial atau hibah;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan dan desa yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi sehingga berdampak pada kualitas produk pembangunan tahunan;
6. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan;
8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pemberdayaan secara lebih terstruktur.
5. Memanfaatkan keinginan dan kemauan masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan dengan memfasilitasinya kedalam sistem perencanaan pembangunan partisipatif.
6. Mendorong lembaga-lembaga masyarakat, formal maupun non-formal, untuk ikut berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat;

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

Sarana dan Prasarana

1. Optimalisasi dan penambahan sarana mobilitas untuk menjangkau wilayah masyarakat yang harus diberdayakan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat selalu mengacu kepada Rancangan Awal RKPD dalam penyusunan Rencana Kerja BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya dalam rangka sinkronisasi dan kesatuan tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa Kebijakan Umum Daerah yang juga menjadi perhatian dan *concern* Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

1. Meningkatkan dan Memperkokoh Ekonomi Kerakyatan
 - Mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil-hasil sektor pertanian berbasis potensi daerah
 - Memudahkan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan pola kemitraan strategis BUMN, BUMD dan pengusaha besar dalam meningkatkan fasilitas permodalan dan investasi di daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
 - Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peran serta PKK dan Posyandu
3. Meningkatkan Pemberdayaan Generasi Muda, Olahraga dan Kesetaraan Gender
 - Meningkatkan peran wanita dalam kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik dengan tidak mengabaikan kodratnya
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan di semua Sektor Pembangunan
 - Peningkatan jaringan dan fasilitas sarana dan prasarana sektor listrik dan air bersih
5. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan berwibawa dalam Rangka Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

- Meningkatkan kompetensi aparatur dan kapasitas manajemen pemerintah daerah
 - Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah di berbagai tingkatan
 - Meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua stakeholders pemerintahan daerah di semua tingkatan.
6. Mengutamakan prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan yang Semakin Baik
- Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup
7. Mengembangkan Potensi Sosial dan Kebudayaan yang Majemuk
- Mewujudkan bentuk tindakan kesetiakawanan sosial, kerjasama dan gotong-royong di berbagai bidang kehidupan

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat akan selalu memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan.

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dan membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2012 – 2016. VISI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

”Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kotawaringin Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

Untuk mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
- 2) Meningkatkan Peranan Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Mengembangkan Usaha Ekonomi dan Masyarakat Desa / Kelurahan.
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemberdayaan masyarakat desa

Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran atau objectives organisasi merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang akan ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga telah tercapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Visi	Misi	Uraian	
		Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kotawaringin Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Meningkatnya pemanfaatan Profil Desa sebagai data awal perencanaan pembangunan desa	Terperbahurainya Profil Desa di Desa- Desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat
	Mengembangkan Usaha Ekonomi dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah Memberdayakan perempuan atau lembaga masyarakat lainnya dalam usaha menunjang pendapatan keluarga	Meningkatnya Kapasitas Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah Meningkatnya peranan perempuan atau lembaga masyarakat lainnya dalam usaha menunjang pendapatan keluarga
	Meningkatkan Peranan Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan	Menguatkan Lembaga-lembaga sosial budaya di masyarakat dan peranan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Menguatnya Lembaga-lembaga sosial budaya di masyarakat dan peranan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatkan Peranan masyarakat dalam pembangunan partisipatif	Meningkatnya Peranan masyarakat dalam pembangunan partisipatif
	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa	Tersedianya Aparatur Pemberdayaan yang memiliki Kapasitas, Kualitas dan Kompetensi sesuai tuntutan Tugas dan Fungsinya

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sejalan dengan Visi Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”* dan sesuai dengan Visi BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yaitu *“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kotawaringin Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”*, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				438.435.736				482.279.310
1	06	01	01	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai, Prangko dan alat Jasa Pengiriman	BPMD	100%	13.300.000	APBD	-	100%	14.630.000
1	06	01	01	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Langganan Telepon, Air, Listrik dan Internet	BPMD	100%	90.900.000	APBD	-	100%	99.990.000

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	06	01	01	03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	01	04	4	Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	01	05	5	Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	01	06	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		BPMD	100%	1.500.000	APBD	-	100%				1.650.000	
1	06	01	01	07	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi	BPMD	100%	62.000.000	APBD	-	100%				68.200.000	
1	06	01	01	08	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang Bersih	BPMD	100%	28.000.000	APBD	-	100%				30.800.000	
1	06	01	01	09	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	BPMD	100%	21.000.000	APBD	-	100%				23.100.000	
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	BPMD	100%	58.118.800	APBD	-	100%				63.930.680	

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	06	01	01	#	#	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan untuk Kebutuhan Kantor	BPMD	100%	16.500.000	APBD	-	100%	18.150.000
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terjaminnya Penerangan Kantor	BPMD	100%	1.200.000	APBD	-	100%	1.320.000
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	BPMD	100%	10.873.875	APBD	-	100%	11.961.263
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	01	#	#	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	BPMD	100%	6.000.000	APBD	-	100%	6.600.000

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	06	01	01	#	#	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keterpaduan Kebijakan Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	BPMD	100%	129.043.061	APBD	-	100%	141.947.367
1	06	01	02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				578.500.000				485.650.000
1	06	01	02	01	1	Pembangunan rumah jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	02	2	Pembangunan rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	03	3	Pembangunan gedung kantor	Penambahan Ruangan Gedung Kantor	-	-	200.000.000	-	-	1 Unit	220.000.000
1	06	01	02	04	4	Pengadaan mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	05	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	-	6 Unit	102.000.000	-	-	-	-
1	06	01	02	06	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	07	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	08	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	09	9	Pengadaan peralatan gedung	Kelancaran Pelaksanaan	BPMD	100%	20.500.000	APBD		100%	

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

						kantor	Tugas							22.550.000
1	06	01	02	#	#	Pengadaan mebeleur	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	BPMD	100%	35.000.000	APBD		100%	-
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terjaminnya Kenyamanan dan Keamanan Kantor	BPMD	100%	136.000.000	APBD	-	100%	149.600.000
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	BPMD	100%	77.000.000	APBD	-	100%	84.700.000
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	BPMD	100%	8.000.000	APBD	-	100%	8.800.000
1	06	01	02	#	#	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	02	#	#	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	03			Peningkatan Disiplin Aparatur				19.000.000				20.900.000
1	06	01	03	01		Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	-	-	-	-	-

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	06	01	03	02		Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas PNS BPMD Kab. Ktw. Barat	BPMD	53 Orang	19.000.000	APBD	-	20.900.000	
1	06	01	03	03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	
1	06	01	03	04		Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	
1	06	01	03	05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Batik PNS BPMD Kab. Ktw. Barat	-	-	-	-	-	-	
1	06	01	04			Program fasilitas pindah/purna Tugas PNS				0			15.000.000	
1	06	01	04	01	1	Pemulangan pegawai yang pensiun	-	-	-	-	-	-	-	
1	06	01	04	02	2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	-	-	-	-	-	-	-	
1	06	01	04	03	3	Pemindahan tugas PNS	Terpenuhinya biaya pemulangan pegawai yang pensiun	BPMD	-	-	-	-	1 Orang	15.000.000
1	06	01	05			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000			55.000.000	

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	06	01	05	01	1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	05	02	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	05	03	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan SDM Aparatur PNS	BPMD	3 Orang	50.000.000	APBD	-	3 Orang	55.000.000						
1	06	01	06			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Keuangan				2.482.500			2.730.750							
1	06	01	06	01	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertib Administrasi	BPMD	5 Buku	1.000.000	APBD	-	5 Buku	1.100.000						
1	06	01	06	02	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tertib Administrasi	BPMD	1 Buku	459.500	APBD	-	1 Buku	505.450						
1	06	01	06	03	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	06	01	06	04	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertib Administrasi	BPMD	1 Buku	1.023.000	APBD	-	1 Buku	1.125.300						

Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015

1	22	01	15				Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				445.200.400				489.720.440
1	22	01	15	01	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan	Lokasi BBG-RM	1 Kali Kegiatan	262.862.000	APBD	Untuk penentuan Lokasi Pelaksanaan kegiatan ini (BB-GRM) baru ditentukan setelah rapat Tim Pembina Tk. Kabupaten setiap tahunnya	1 Kali Kegiatan	289.148.200	
							Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	6 Kecamatan	188 Orang	-	-	-	188 Orang		
							Jumlah kader Posyandu yang terlatih	Arut Selatan	180 Orang	-	-	-	180 Orang		
1	22	01	15	02	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat	Menambah Pengetahuan Masyarakat dan Peduli Lingkungan	Desa Kumpai Batu Atas, Tanjung Terantang, Keraya, Sei. Bakau, Nanga Mua, Sukarami, Sei. Rangit Jaya, Purbasari, Sungai Hijau dan Amin Jaya	80 Orang	43.255.000	APBD	-	80 Orang	47.580.500	
1	22	01	15	03	3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Membangun Desa	Desa Sambu, Penyombaan, Kerabu, Sukarami, Panahan dan 94 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat	100%	139.083.400	APBD	Pembangunan Pembangkit Tenaga Kincir Angin dan Kincir Air	100%	152.991.740	

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	22	01	16			Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				401.579.100					441.737.010
1	22	01	16	01	1	Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	01	16	02	2	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa	6 Kecamatan	50 Orang	131.579.100	APBD	Pelatihan Pengelola Pasar Desa	50 Orang		144.737.010
1	22	01	16	03	3	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	01	16	04	4	Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	01	16	05	5	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan PNPM-MPd	10.572 RTM	100%	270.000.000	APBD	-	100%		297.000.000
1	22	01	16	06	6	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	01	16	07	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	01	17			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				563.939.422					620.333.364

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	22	01	17	01	1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa	Jumlah aparatur Desa, Anggota BPD, Kelembagaan Desa dan Pemuda Akti Desa yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Pembangunan Partisipatif	3 Desa Lokasi PM2L	90 Orang	150.000.000	APBD	Untuk penentuan Desa Lokasi PM2L menunggu Penetapan SK dari Gubernur Kalimantan Tengah setiap tahunnya, untuk tahun 2014 sudah diusulkan kepada Provinsi dan masih menunggu ketetapan	90 Orang	165.000.000
1	22	01	17	02	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa dalam Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa	6 Kecamatan	94 Desa/Kel	45.043.960	APBD	-	94 Desa/Kel	49.548.356
1	22	01	17	03	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan tambahan asupan gizi	6 Kecamatan	1.309 Orang	231.895.462	APBD	Sesuai dengan SK Bupati Nomor 51 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Sasaran PMT-AS, maka PMT-AS hanya diberikan kepada SD/Ponpes/MI di desa tertinggal	1.309 Orang	255.085.008
1	22	01	17	04	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rata-rata pelaksanaan Monev, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pertahun	6 Kecamatan	6 Kec	137.000.000	APBD	-	6 Kec	150.700.000
1	22	01	18			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				550.000.000				605.000.000

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	22	01	18	01	1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	01	18	02	2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Perdesaan	Terlatihnya Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	6 Kecamatan	282 Orang	250.000.000	APBD	-	6 Kec	275.000.000					
1	22	01	18	03	3	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terlatihnya Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	6 Kecamatan	282 Orang	250.000.000	APBD	-	6 Kec	275.000.000					
1	22	01	18	04	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADD dan Dana Desa	6 Kec	50.000.000	APBD	-	6 Kec	55.000.000					
1	22	01	19			Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				75.109.220			82.620.142						
1	22	01	19	01	1	Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Bertambahnya Ekonomi Keluarga	Kec. Arsel	40 Orang	75.109.220	APBD	-	40 Orang	82.620.142					
1	22	01	20			Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan				71.871.122			79.058.234						

*Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2015*

1	22	01	20	01	1	Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan	Tersusunnya Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan pembangunan	2 Kecamatan	6 Kec	71.871.122	APBD	-	6 Kec	79.058.234
1	11	01	18			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan				413.700.500				455.070.550
1	11	01	18	01	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Meningkatnya SDM Anggota Organisasi Wanita	Kotawaringin Barat	150 Orang	413.700.500	APBD	-	250 orang	455.070.550
TOTAL PAGU INDIKATIF										3.609.818.000				3.835.099.800

Output Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Program Tahunan** Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Prinsip pelaksanaan arah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pencapaian tujuan dan sasaran didasarkan pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Partisipatif;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengutamakan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

2. Demokratis;

Berorientasi pada musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan kearifan lokal.

3. Kapabilitas;

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan berbagai potensi yang dimiliki dan kemampuan pemerintah desa dalam program pemberdayaan.

4. Responsible;

Menekankan tanggung jawab baik aparat pemberdayaan maupun masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan program pemberdayaan.

5. Akuntabilitas dan transparan;

Pelaksanaan program pemberdayaan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Keberlanjutan;

Program pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya masyarakat secara optimal yang ramah lingkungan serta berkesinambungan dalam suatu tahapan – tahapan tertentu.

7. Integratif

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan serta proses interaksi antar elemen pembangunan termasuk masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan secara terpadu dan terintegrasi dalam suatu keutuhan masyarakat dan pemerintah desa.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pangkalan Bun, Juli 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dra. AIDA LAILAWATI

NIP 19680303 198911 2 001